

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibukota kabupaten merupakan suatu perwilayahan pusat atau sentral pengendalian pembangunan yang akan mendorong terjadinya pertumbuhan secara seimbang antara kota dengan desa yang bersinergis serta merupakan wilayah pusat keseimbangan regional (*regional balance*). *Regional Balance* yaitu daya dukung suatu potensi wilayah tergantung pada keseimbangan penyebaran penduduk yang memperoleh peluang yang sama terhadap demografi ekonomi sosial dan lingkungan untuk mewujudkan seluruh potensi yang dimiliki dapat menghasilkan suatu jaminan kualitas pelayanan publik. (Hamid 2008).

Menurut Richardson (2001), dalam teori tempat pusat dinyatakan bahwa fungsi pokok suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan, penyuplai barang-barang dan jasa sentral seperti jasa eceran, perdagangan, perbankan dan profesional, fasilitas pendidikan, hiburan, kebudayaan dan jasa-jasa pemerintahan. Ketika ibukota kabupaten sudah tidak mampu lagi menjalankan fungsinya maka harus ada upaya untuk memindahkan Ibukota Kabupaten tersebut

Salah satu daerah yang telah dipindahkan ibukota nya adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemindehan ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dikarenakan pusat penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berada di luar wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu berada di wilayah kota Payakumbuh. Oleh karena itu, ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota harus di pindahkan ke wilayah dalam administratif Kabupaten Lima Puluh Kota. Sarilamak di tetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota di wilayah

Kecamatan Harau setelah melalui tahapan dan proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sarilamak secara legal formal ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten (IKK) Lima Puluh Kota sejak tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini berdasarkan usulan gubernur Sumatera Barat dan bupati Kabupaten Lima Puluh Kota serta telah melalui kajian tim pusat. Penetapan Sarilamak sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota membuat pemerintahan harus segera membuat kebijakan untuk segera membangun wilayah Kota Sarilamak. Tahun 2012 di sahkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2012.

Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan tiga pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yaitu kawasan IKK Sarilamak, kawasan Mungka, dan kawasan Pangkalan Koto Baru. Penetapan ke tiga kawasan ini sebagai kawasan strategis Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan karena ketiga daerah ini memiliki potensi tersendiri yang diyakini mampu mendorong perekonomian daerah. Mungka selama ini telah berkembang sebagai kawasan sentra produksi ternak unggas, Sarilamak telah berkembang sebagai sentra pemerintahan, pendidikan dan sebagainya serta pangkalan telah berkembang sebagai sentra pengembangan tanaman perkebunan seperti gambir, karet dan sebagainya. Sebagai kawasan strategis utama pemerintah harus memberikan

perhatian khusus agar wilayah ini dapat menjalankan fungsi sebagai mana yang telah ditetapkan. (BAPPEDA : 2014)

Sarilamak sebagai salah satu kawasan strategis Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai beberapa fungsi utama. Fungsi utama Kota Sarilamak menurut hasil wawancara dengan Wali Nagari Sarilamak antara lain: 1. sebagai pusat pemerintahan terpadu, 2. pusat perdagangan regional, 3. pusat pendidikan, 4. pusat kesehatan, 5. pusat industri, 6. pusat pariwisata, 7. pusat pemukiman. Namun belum ada dari fungsi ini dapat berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena terhambatnya pembangunan di kawasan Kota Sarilamak karena konsep rencana tata ruang wilayah tidak jelas.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum jelas berdampak pada Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK). Rencana detail tata ruang kota merupakan peraturan turunan dari rencana tata ruang wilayah yang akan digunakan oleh pemerintah nagari sebagai acuan dalam membuat peraturan di tingkat nagari, khusus nagari yang berada di wilayah pusat ibukota. Hal ini dapat dilihat dari penetapan wilayah jorong Purwajaya yang berada dalam Nagari Sarilamak sebagai pusat pendidikan. Namun kondisi hari ini area yang direncanakan tersebut sudah dibangun perumahan sebagai tempat pemukiman.

Selama 14 tahun telah dilakukan berbagai upaya membangun Sarilamak menjadi sebuah pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota yang representatif yang dapat melayani masyarakat secara luas. Berawal dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tentang Pemindahan Ibukota

Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke Sarilamak Dalam Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota maka dimulai lah berbagai pembangunan ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi sebuah pusat pemerintahan yang representatif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu, perpindahan ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Payakumbuh (kota Payakumbuh saat ini) ke Sarilamak Kecamatan Harau tentu telah banyak merubah pola masyarakat daerah yang dulu berada di desa dan sekarang telah menjadi kota. Di sisi lain daerah yang dulu bertumpu pada sektor pertanian telah banyak berubah dan terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan lain sebagainya. Sebagai contoh terjadi pada Jorong Ketinggian yang merupakan salah satu jorong yang ada di Nagari Sarilamak telah terjadi penurunan luas sawah mencapai 10 hektar.

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pendapat masyarakat ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut terhadap kebijakan relokasi ini berdasarkan pandangan mereka. Untuk itu peneliti mengambil judul : **“Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Relokasi Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”**

1.2 Rumusan masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat di Sarilamak dilihat dari segi pendapatan.

2. Bagaimana pendapat masyarakat tentang pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat di Sarilamak dilihat dari segi indeks pembangunan manusia (IPM).
3. Bagaimana pendapat masyarakat tentang pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat di Sarilamak dilihat dari segi pelayanan publik.
4. Bagaimana pendapat masyarakat tentang pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat di Sarilamak dilihat dari segi infrastruktur.
5. Bagaimana pendapat masyarakat tentang pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat di Sarilamak dilihat dari segi dampak lingkungan.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat Sarilamak dari segi pendapatan berdasarkan sudut pandang masyarakat.
2. Menganalisis pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat Sarilamak dari segi indeks pembangunan manusia (IPM) berdasarkan sudut pandang masyarakat.
3. Menganalisis pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat Sarilamak dari segi pelayanan publik berdasarkan sudut pandang masyarakat.

4. Menganalisis pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat Sarilamak dari segi pembangunan infrastruktur berdasarkan sudut pandang masyarakat.
5. Menganalisis pengaruh relokasi ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap kesejahteraan masyarakat Sarilamak dari segi dampak lingkungan setelah terjadi perpindahan ibukota berdasarkan sudut pandang masyarakat.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini akan menambah jumlah penelitian baru mengenai relokasi Kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh Pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Penelitian dapat membantu masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengetahui eksistensi kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat dalam mendalami ilmu pengetahuan terkhusus bidang ilmu ekonomi serta menjadi acuan bagi penulis selanjutnya yang tertarik dengan judul serupa.